

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan

Menilik Ketercapaian Indikator Sasaran dari Tujuan LPP TVRI

Isu Strategis

Salah satu arah kebijakan Nasional dalam Rancangan Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah “meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia”. Arah kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman Lembaga Penyiaran Publik Televisi Nasional Indonesia (LPP TVRI) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) TVRI yaitu dengan menentukan tujuan organisasi LPP TVRI yaitu “Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik dan Meningkatkan kualitas internal kelembagaan TVRI”.

Terdapat beberapa indikator sasaran dalam yang dapat menjadi acuan untuk melihat ketercapaian tujuan LPP TVRI diantaranya yaitu untuk melihat ketercapaian tujuan Meningkatkan kualitas konten penyiaran TV Publik, dapat menggunakan indikator sasaran yaitu *Audience Share/Rating*, lalu untuk melihat ketercapaian tujuan meningkatnya kualitas internal kelembagaan LPP TVRI, dapat menggunakan indikator sasaran yaitu “Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jumlah Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)”. Berikut merupakan pembahasan ketercapaian indikator sasaran pada tiap tujuan LPP TVRI tersebut dilengkapi dengan pembahasan berbagai permasalahan didalamnya:

1. Ketercapaian Indikator Sasaran *Audience Share* LPP TVRI Tahun 2018 – 2021

Dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa penyiaran bertujuan untuk “memperkokuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPP TVRI tentunya butuh penonton yang dapat menyerap seluruh konten acara yang disiarkan oleh LPP TVRI sesuai dengan tujuan yang telah tertera berdasarkan UU Penyiaran. Semakin banyak penonton, maka akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan konten penyiaran dengan tujuan sesuai UU Penyiaran. Berikut

2022

Komisi I

merupakan perbandingan antara target dan capaian *Audience Share* LPP TVRI tahun 2018 – 2021:

Tabel. Capaian Indikator Sasaran *Audience Share* LPP TVRI Tahun 2018 – 2021

<i>Audience Share</i>	2018	2019	2020	2021
Target	1,00%	1,20%	1,70%	2,00%
Capaian	0,94%	1,62%	1,43%	1,28%

Sumber: Renstra LPP TVRI Tahun 2018 – 2019, Renstra LPP TVRI Tahun 2020 – 2024, dan LAKIP LPP TVRI Tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 – 2021, LPP TVRI hanya berhasil mencapai target *Audience Share* sekali yaitu pada tahun 2019. Target tidak tercapai pada tahun 2018, 2020, dan Tahun 2021, bahkan terdapat tren penurunan pada tahun 2019 – 2021. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP TVRI Tahun 2020, disebutkan bahwa hambatan dalam meningkatkan *Audience Share* adalah belum adanya konten unggulan yang dapat mengikat penonton, adanya program Analog Switch Off (ASO) yang menyebabkan beberapa rumah yang masih menggunakan analog menerima kualitas siaran yang kurang baik, dan kurangnya sosialisasi terhadap acara LPP TVRI. Hal ini perlu mendapatkan solusi tuntas dan terukur oleh LPP TVRI agar dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat UU penyiaran yaitu “sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial”.

2. Ketercapaian Indikator Sasaran Opini BPK RI dan Jumlah Peningkatan PNBP LPP TVRI Tahun 2018 – 2021

UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan terkait tanggung jawab keuangan negara yaitu “kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah diperiksa oleh BPK RI. Dalam hal ini, patut diapresiasi karena LPP TVRI telah mendapatkan opini WTP dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2021. Berikut adalah opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2018 - 2021:



Gambar. Opini BPK RI terhadap LK LPP TVRI Tahun 2018 – 2021

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, diolah

Visnovsky dan Luluhova (2014) menjelaskan bahwa terdapat perdebatan terkait tujuan televisi publik yang dianggap seharusnya tidak *profit oriented* dan lebih kepada pemberian informasi serta diseminasi nilai-nilai bangsa dengan pendapat bahwa televisi publik juga harus memiliki rencana dalam pembiayaan kegiatan mereka sendiri serta kontribusi terhadap negara dari sisi ekonomi. Hal ini juga diatur dalam UU Penyiaran yaitu “dalam menjalankan fungsinya, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”. Berangkat dari hal ini, maka tidak menjadi suatu hal yang tabu jika negara menuntut peningkatan pendapatan kepada institusi penyiaran publik seperti LPP TVRI, maka LPP TVRI memiliki target peningkatan PNBP dengan capaian sebagai berikut:

Tabel. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PNBP LPP TVRI Tahun 2018 - 2021

PNBP	2018	2019	2020	2021
Target	127,4	127,5	132,2	292,8
Capaian	175,4	148,9	212,7	-

Sumber: Renstra LPP TVRI Tahun 2018 – 2019, Renstra LPP TVRI Tahun 2020 – 2024, dan LHP atas LK LPP TVRI Tahun 2018 – 2020, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa LPP TVRI selalu mencapai target dalam hal peningkatan PNBP. Walaupun target PNBP selalu tercapai, BPK RI selalu memuat temuan mengenai pengelolaan PNBP di LPP TVRI pada tahun anggaran 2018 – 2021. Temuan-temuan pengelolaan PNBP tersebut sedikitnya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan piutang PNBP senilai Rp7.435.305.872 atas invoice yang belum dicatat sebagai piutang pada tahun anggaran 2018.
2. Kekurangan penerimaan negara karena adanya denda keterlambatan sewa aset dan penyelenggaraan jasa penyiaran yang belum dikenakan sebesar Rp541.055.715 pada tahun anggaran 2019.
3. PNBP belum disetor sebesar Rp398.031.053 dan hilangnya potensi PNBP atas denda keterlambatan pembayaran oleh instansi pemerintahan sebesar Rp1.974.702.067 pada tahun anggaran 2020.

Saran Perhatian

Secara umum dapat disimpulkan bahwa LPP TVRI telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik dengan baik melihat ketercapaian beberapa indikator sasaran. Namun, capaian ini belum maksimal karena masih terdapat indikator yang belum tercapai yaitu *Audience Sharing* serta pencapaian pada peningkatan PNBP masih menyisakan beberapa permasalahan. Maka, berikut yang dapat dilakukan Komisi I DPR RI untuk meningkatkan ketercapaian indikator sasaran LPP TVRI:

1. Meminta LPP TVRI untuk meningkatkan kualitas siaran agar dapat lebih menarik penonton tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan yang harus dijunjung oleh LPP TVRI. Dapat dilakukan dengan meningkatkan acara hiburan dan olahraga serta mengurangi program acara informasi.
2. Meminta LPP TVRI untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Mendorong LPP TVRI untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI
4. Mendorong LPP TVRI untuk terus meningkatkan PNBP dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi PNBP.

Referensi

BPK RI. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun Anggaran 2018. Indonesia.

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun Anggaran 2019. Indonesia.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun Anggaran 2020. Indonesia.

BPK RI. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Indonesia.

LPP TVRI. 2019. Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2018 – 2019. Indonesia

LPP TVRI. 2020. Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2020 – 2024. Indonesia

LPP TVRI. 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LPP TVRI Tahun 2020. Indonesia.

Visnovksy, Jan dan Luluhova, Juliana. 2014. Public Television as a Provider of Human Values. *European Journal of Science and Theology*. Vol. 10.

2022

Komisi I